

Tingkat Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir pada SDN Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020

¹Rona Verolika Sari, ²S Otniel Ketaren, ³Fridalina Tarigan, ⁴Donal Nababan, ⁵Mido Ester Sitorus
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pascasarjana,
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Jl. Kapten Muslim No.79, Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123
ronaverolikasari27@gmail.com

ABSTRAK

Pengurangan risiko bencana sangat diperlukan untuk menghadapi segala bencana terutama bencana banjir dikarenakan banyaknya dampak yang disebabkan bencana banjir salah satunya bisa terjadinya bencana longsor. Kesiapsiagaan merupakan salah satu mekanisme penanggulangan bencana serta sebagai upaya untukantisipasi dan pengurangan akibat terjadinya resiko bencana. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kesiapsiagaan adalah dengan cara peningkatan pengetahuan dan sikap yang dilakukan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana banjir Pada Sekolah Dasar Negeri Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif melalui wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa rekaman dan catatan lapangan yang dianalisis. Penelitian ini mengidentifikasi empat poin yaitu kebijakan kesiapsiagaan, rencana tanggap darurat, peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya manusia Upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapi bencana banjir di Sekolah Dasar memiliki respon yang berbeda-beda tentang kebijakan kesiapsiagaan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks atau tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir di Komunitas SD Negeri Pinding Kecamatan Babel masih tergolong kategori rendah.

Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Bencana Banjir, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Disaster risk reduction is very necessary to deal with all disasters, especially floods because of the many impacts caused by floods, one of which can be landslides. Preparedness is a disaster management mechanism as well as an effort to anticipate and reduce the consequences of disaster risk. Activities carried out to increase preparedness are by increasing the knowledge and attitudes of the community. The purpose of this study was to analyze the level of school preparedness in facing flood disasters at the SD Negeri Pinding, Babel District, Aceh Tenggara District in 2020. The type of research used is qualitative with descriptive phenomenological design through in-depth interviews. The data collected in the form of records and field notes were analyzed. This research identifies four points, namely preparedness policies, emergency response plans, disaster warnings, and human resource mobilization. Disaster risk reduction efforts in dealing with flood disasters in primary schools have different responses regarding disaster preparedness policies. The results showed that the index or level of preparedness to face flood disasters in the SD Negeri Pinding, Babel District, was still in the low category.

Keywords: Preparedness, Flood Disaster, Elementary School

Pendahuluan

Sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia merupakan jenis bencana hidrometeorologi yaitu sekitar 90%. Bencana tersebut dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan, seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan. Dari banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, bencana banjir adalah bencana yang paling sering terjadi, terutama pada musim hujan (BNPB, 2017).

Pengurangan risiko bencana sangat diperlukan untuk menghadapi segala bencana terutama bencana banjir dikarenakan banyaknya dampak yang disebabkan bencana banjir salah satunya bisa terjadinya bencana longsor (Chairummi, 2013). Anak-anak dan remaja adalah asas pertahanan dan harus diberikan ruang dan modalitas untuk berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana, sesuai dengan Undang-Undang Praktek Nasional dan Kurikulum Pendidik (BNPB,2015).

Banjir maupun bencana lainnya tidak dapat diprediksi waktu datangnya, sehingga anak didik diharapkan mampu melakukan siap siaga bencana, karena bisa menyelamatkan diri maupun membantu orang tua atau orang lain, terlebih lagi apabila terjadi pada saat jam-jam pelajaran. Sehingga peserta didik harus memiliki bekal kesiapsiagaan bencana untuk menghadapi bencana yang akan terjadi. Secara kuantitatif sebanyak 250.000 atau 75% sekolah/madrasah di Indonesia berada pada risiko sedang hingga tinggi dari bencana (BNPB,2014).

Dari 32 Provinsi di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan urutan ke 7 (tujuh) tertinggi sebaran jumlah sekolah yang berada di wilayah ancaman tinggi bencana menurut data Badan Penanggulangan Bencana (BNPB, 2017). Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mengatakan bahwa telah terjadi bencana banjir dan longsor di 126 (seratus dua puluh enam) desa pada 53 (lima puluh tiga)

kecamatan di 12 (dua belas) kabupaten di seluruh Provinsi Aceh pada bulan Oktober 2019. Dua belas Kabupaten tersebut yakni Aceh Jaya, Pidie Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, Simeulu, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Subulussalam, Bireuen dan Aceh Tenggara. Sekolah Dasar Negeri Pinding adalah salah satu Sekolah Dasar Negeri yang berada di Aceh Tenggara yang tak luput dari bencana banjir. (BNPB, 2017)

Data BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, pada 20 April 2017 terjadi bencana banjir bandang akibat pembalakan liar, pembukaan lahan baru, di Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Semadam. Tanggal 24 November dan 26 November 2018 terjadi lagi banjir bandang dimana 1225 warga terdampak dan 47 KK mengungsi. Tanggal 3 Desember 2018 banjir melanda 4 kecamatan, 5 desa, 130 KK mengungsi. Dalam 10 tahun terakhir (2010-2019) terjadi 37 kali bencana banjir, 9 jiwa meninggal , 38.722 jiwa mengungsi, 443 rumah rusak berat , 1480 rusak sedang, dan 2659 bangunan terendam. Tahun 2017 ada 9 kali kejadian banjir, dan tahun 2017 terjadi 7 kali. (BNPB, 2017).

SD Negeri Pinding Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu sekolah yang berada di daerah rawan banjir. Maka dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir pada Sekolah Dasar Negeri Pinding di Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif observasional dan menggunakan rancangan studi kasus (*case study*). Dalam hal ini yang akan diteliti adalah studi kasus mengenai sejauh mana tingkat kesiapsiagaan

menghadapi bencana banjir pada sekolah dasar negeri pinding kecamatan bambel Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Pinding di Kabupaten Aceh Tenggara, pada bulan Maret – Agustus 2020.

Informan pada penelitian ini adalah informan yang benar-benar dipilih yang mengetahui tentang sejauh mana tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir pada Sekolah Dasar Negeri Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, dan data-data yang dapat membantu memahami permasalahan dalam penelitian. Adapun informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang, yaitu:

- a. 1 orang Kepala Sekolah SD Negeri Pinding Kab. AcehTenggara
- b. 2 orang Guru SD Negeri Pinding Kab. AcehTenggara
- c. 1 orang Tenaga Administrasi SD Negeri Pinding Kab. Aceh Tenggara
- d. 1 Penjaga sekolah SD Negeri Pinding Kab. Aceh Tenggara

Hasil

Tingkat Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah

Menurut panduan yang dikeluarkan oleh LIPI untuk mengukur tingkatkesiapsiagaan komunitas sekolah dan Panduan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Siaga Becana, ada kuesioner yang diajukan untuk institusi sekolah (S1), guru (S2), dan kuesioner untuk murid (S3). Kuesioner tersebut menyangkut parameter untuk mengetahui pengetahuan tentang bencana (*knowledge and attitude/ KAP*), parameter rencana tanggap darurat (*emergency planning/ EP*), parameter peringatan bencana (*warning sistem/ WS*), dan parameter mobilisasi sumber daya (*resourcemobilization capacity/ RMC*). Indeks dari S1, S2, dan S3 digabung menjadi indeks

gabungan (*composite index*). Semakin besar angka indeks (0 - 100), menunjukkan semakin tinggi tingkat kesiapsiagaannya (*preparadness rate*) dari subjek yang sedang dikaji (Adiyoso, 2018)

Pengukuran indeks untuk institusi sekolah dilakukan dengan 4 indikator yaitu indikator kebijakan kesiapsiagaan (PS) dengan 10 pertanyaan, indikator rencana tanggap darurat (EP) dengan 6 pertanyaan, indikator peringatan bencana (WS) dengan 12 pertanyaan, dan indikator mobilisasi sumber daya manusia (RMC) dengan 9 pertanyaan. Skor dari tiap pertanyaan sebesar 1, dan ada pertanyaan yang dibagi beberapa sub pertanyaan, sehingga skor dari sub pertanyaan adalah 1 dibagi jumlah sub pertanyaan.

Hasil Wawancara dengan Informan

Untuk jawaban tentang Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana, bahwa ada kebijakan/program pendidikan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam tingkat kabupaten, demikian juga beberapa peraturan perundangan tentang Penanggulangan Bencana, akan tetapi pihak sekolah tidak melaksanakan kebijakan tersebut atau membuat program tersendiri, seperti pengintegrasian materi kesiapsiagaan ke dalam mata pelajaran yang relevan di sekolah. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi hanya disampaikan kepada pihak guru.

Ketika dilakukan wawancara mendalam kepada para informan didapatkan jawaban beragam seperti dibawah ini.

Menurut informan pertama:

“setau saya ya, sampai sekarang ini, tidak ada di buat materi Kurikulum sekolah tentangK3”

Informan Kedua mengatakan:

“Tidak ada itu materi K3 sampai sekarang, dan tidak ada juga anjuran KepalaSekolah supaya melaksanakan ataupun membuat program tersendiri”

Informan Ketiga mengatakan:

“Saya pun tidak tahu juga mengapa materi itu tidak dibuat, jadi saya sebagai guru iya Cuma mengikuti apa yang dibilang kepala sekolah, memang sampai saat ini belum ada”

Informan Keempat mengatakan:

“sepertinya belum ada, iya mungkin menunggu anjuran dari kepala sekolah aja”

Informan Kelima mengatakan:

“saya pun tidak tahu materi itu ada atau ngaknya dibuat karena saya sebagai penjaga sekolah tidak perna tanya juga keguru2nya”

Untuk kuesioner tentang Rencana Tanggap Darurat (EP), secara umum jawaban sudah baik seperti sekolah sudah mempunyai *backup* atau salinan/ duplikat dokumen-dokumen sekolah yang disimpan ditempat aman dari bencana alam. Demikian juga sekolah sudah mencoba menyiapkan rencana evakuasi, menyiapkan perlengkapan dan peralatan evakuasi. Sekolah membuat kegiatan dokter kecil, menyiapkan kotak pertolongan pertama dan obat-obatan penting. Akan tetapi jawaban atas pertanyaan apakah kelompok-kelompok gugus siaga bencana sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur tetap (protap), ternyata jawabannya “tidak” ketika dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan, didapat jawaban seperti dibawah ini:

Informan pertama mengatakan:

“Belum ada dibuat kelompok gugus siaga bencana disekolah tetapi dokter-dokter kecil disekolah sudah dibentuk dari sebelumnya”

Informan kedua mengatakan:

“setau saya tidak ada ya, karena tidak termasuk juga dalam peraturan sekolah, bahkan kepala sekolah tidak ada mengarahkan”

Informan Ketiga mengatakan:

“belum ada dibuat, iya mungkin karna belum ada bencana banjir bencana yang hebat sebelum-sebelumnya,

Informan Keempat mengatakan:

“sepertinya belum ada dibuat kelompok gugus siaga banjir, saya tidak mengerti juga kenapa tidak dibuat, karena akhir-akhir ini sering terjadi banjir, iya kita tunggu apa yang dibilang kepala sekolah aja”

Informan Kelima mengatakan:

“setau saya tidak ada kelompok gugus siaganya, dan gak tahu juga kenapa kan”

Untuk kuesioner tentang Peringatan Bencana (WS), dari 12 pertanyaan didapat jawaban secara umum bahwa informasi tentang peringatan bencana sudah ada dan sudah disosialisasikan di sekolah. Akan tetapi kelompok peringatan bencana sekolah tidak memiliki protap tertentu seperti tanda bunyi peringatan bencana, pembatalan bahaya, dan tidak menyiapkan atau memelihara peralatan untuk peringatan bencana.

Dari jawaban wawancara mendalam dengan informan didapat jawaban sebagai berikut:

Informan pertama mengatakan:

“belum ada direncanakan dibuat peringatan-peringatan menggunakan alat tapi saya sudah memberi tahukan keguru-guru untuk memberikan peringatkan bila terjadi benjir sewaktu jam sekolah kepada murid-murid perkelas saja, iya cuma ngomong gitu aja gak pakai alat”.

Informan Kedua mengatakan:

“sosialisasi pernah dilakukan ya di sekolah, sampai saat ini belum ada banjirkan, kalaupun ada paling kami buat peringatan dengan cara ngomong di kelas-

kelas, tidak pakai alat peringatan seperti yang ibu bilang tadi, karena tidak ada tersedia kanalatnya”

Informan Ketiga mengatakan:

“...Nah itu, dalam setahun terakhir inikan tidak pernah ada hujan sewaktu sekolah, kalaupun ada pas belajar mengajar hujan tidak deras, seringnya hujan di malam hari, jadi tidak ada peringatan peringatan gitu dari pihak sekolah”

Informan Keempat mengatakan:

“tidak ada dibuat tanda bunyi seperti ibu yang bilang itu, karena banjir itu selalu datang dimalam hari, yah mungkin karena itu dari pihak sekolah ngak menyediakan alat yang begituan”

Informan Kelima mengatakan:

“yang saya tau lonceng sekolah Cuma yang ada, seperti masuk kelas, dan waktu jam istirahat aja, belum ada saya tanda bunyi khususnya”

Kuesioner “Mobilisasi Sumber Daya Manusia (RMC) diketahui bahwa disekolah tersedia petugas/ kelompok/ gugus tugas yang dapat dimanfaatkan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti Pramuka, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dokter kecil dan lain-lain. Pimpinan, guru dan staf sekolah sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan atau diskusi tentang pengetahuan tentang kebencanaan, rencana evakuasi, pertolongan pertama, sistem peringatan, dan simulasi evakuasi, juga tersedia beberapa buku, poster, dan brosur tentang bencana alam.

Dalam pernyataannya, pihak sekolah tidak pernah mendapat bantuan atau bimbingan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Bantuan pernah diterima justru dari pihak swasta/ perusahaan berupa bantuan pendanaan.

Masing-masing kelompok gugus tugas siaga bencana sekolah dapat dikatakan belum punya bahan/ peralatan yang memadai, antara lain untuk pertolongan pertama, evakuasi/ penyelamatan dan logistik, sehingga kelompok/ gugus tugassiaga bencana yang ada juga tidak pernah meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Berikut didapat jawaban informan setelah dilakukan wawancara mendalam, sebagai berikut:

Informan pertama mengatakan:

“Tidak ada tuh bantuan dari pemerintah. Yang ada bantuan dari PLN, sekitartahun berapa itu,

2019 sampai dengan 2020 lah perkiraannya bu.”

Informan Kedua mengatakan:

“Ga ada ya bimbingan untuk menghadapi banjir kalau di sekolah, yang ada itu bimbingan untuk bencana kebakaran. Cuma, dari RT setempat ada sih diadakan penyuluhan tentang menghadapi banjir untuk menambah wawasan masyarakat itu. Di sekolah ya, tidak ada”.

Informan Ketiga mengatakan:

“yang saya tau Cuma dari bantuan PLN aja, kalau dari pemerintah daerah tidak ada, Cuma waktu banjir itu pihak dari dinas pendidikan ikut serta membantu membersihkan sekolah”

Informan Keempat mengatakan:

“waktu banjir itu langsung ada bantuan dari PLN dan serta melakukan bimbingan tentang kebakaran aja gak tentang banjir, kalau dari pemerintah saat banjir itu gak ada sih, tapi sekarang saya liat ada bantuan dari pemda ya lagi

buat penimbunan sekolah dan perbaikan bangunan sekolah karena dari banjir kemaren banyak yang rusak kek bangunan, yah Cuma itu”.

Informan Kelima mengatakan:

“gak ada dilakukan bimbingan khusus atau semacamnya, bantuan pun Cuma dari PLN aja setau saya Cuma itu”.

Pembahasan

Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir SD Negeri Pinding Kec Babel dari aspek kebijakan.

Pertama sekali perlu dikemukakan bahwa pengukuran tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah hanya dilakukan dengan mengisi kuesioner untuk institusi sekolah (S1), sementara kuesioner untuk guru (S2), dan kuesioner untuk murid (S3) tidak dilakukan karena waktu peneliti turun ke lapangan, sekolah Dasar Negeri Pinding sebagai lokasi penelitian dalam keadaan tidak ada pembelajaran mengajar karena situasi pandemic covid 19. Akan

tetapi untuk mendalami realita kesiapsiagaan, peneliti mengambil informan dari kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah. Wawancara mendalam dengan informan juga dilakukan dengan protocol kesehatan, sehingga jawaban informan relative singkat maupun durasi wawancara, hal ini merupakan keterbatasan penelitian.

Dari 4 (empat) indikator pengukuran tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah, indikator kebijakan kesiapsiagaan merupakan indikator yang paling rendah nilainya yaitu 35%. Dari informan yang diwawancarai didapatkan jawaban bahwa walaupun ada kebijakan/program pendidikan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di tingkat Kabupaten, akan tetapi pihak sekolah tidak melaksanakan kebijakan tersebut, juga tidak membuat kebijakan atau program sendiri seperti pengintegrasian materi kebencanaan kedalam mata pelajaran yang relevan disekolah.

Menurut informan guru/ pendidik peningkatan pengetahuan dari keterampilan tentang kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi hanya pernah sekali disampaikan kepada pihak guru, selanjutnya tidak ada arahan apapun dari kepala sekolah. Dari 9 (Sembilan) pertanyaan tentang kebijakan kesiapsiagaan, hanya 3 (tiga) pertanyaan yang dijawab “ya” yaitu : ada kebijakan program pendidikan pendidikan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di tingkat Kabupaten, apakah pimpinan/ guru/ staff sekolah mengetahui peraturan-peraturan tentang kebencanaan, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru tentang kesiapsiagaan walau tidak dilaksanakan secara regular. Hal ini menyebabkan indeks kebijakan kesiapsiagaan di SD Negeri Pinding termasuk kategori rendah, bahkan sangat rendah.

Sebuah penelitian tentang Evaluasi Sekolah Siaga Bencana di daerah Cangkringan sleman, bahwa indeks kesiapsiagaan pendidik pada komunitas sekolah masuk pada kategori sedang (Sarwidi, dkk, 2015).

Tampaknya penekanan perlunya kebijakan kesiapsiagaan perlu ditingkatkan, padahal Kemendikbud sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 70/SE/MPN/2010 Tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) disekolah.

Sekolah/ Madrasah Aman dari bencana yang diperbarui namanya menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan program dari Kemendikbud bertujuan mewujudkan pendidikan tangguh bencana yang memerlukan upaya- upaya komprehensif yang berpusat pada anak. Berpusat pada anak adalah seluruh upaya dilakukan dengan memahami bahwa anak-anak memiliki kebutuhan yang spesifik dalam menghadapi bahaya bencana serta seluruh upaya tersebut dilakukan dengan mengajak anak-anak ikut serta aktif sesuai minat dan kapasitasnya (Seknas SPAB,2017).

Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir SD Negeri Pinding Kecamatan Babel dari aspek rencana tanggap darurat

Indikator Rencana Tanggap Darurat, ada 6 (enam) pertanyaan yang dijawab “ya” sebanyak 3 pertanyaan, sehingga indeksnya adalah 50%, pertanyaan tentang apakah sekolah mempunyai *back up* atau copy/ salinan dokumen- dokumen penting dan disimpan di tempat aman, apakah sekolah telah menyiapkan rencana evakuasi, dan apakah sekolah terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pertolongan pertama, semua informan menjawab “ya”. Akan tetapi pertanyaan tentang apakah sekolah sudah memiliki prosedur tetap (protap), apakah protap sudah disimulasikan, dan pertanyaan tentang kelomok-kelompok gugus siaga bencana, semua informan menjawab “tidak”.

Hal ini belum memenuhi anjuran pemerintah sebagaimana tertuang dalam 10 (sepuluh) langkah mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana, dimana langkah ke-enam yaitu “Penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana sekolah, langkah ke-tujuh yaitu

“Penyusunan prosedur tetap untuk masa pra, saat dan paska bencana, dan langkah ke-delapan yaitu “Melakukan simulasi teratur sebanyak 2 (dua) kali setahun. Ketiga langkah ini belum dilakukan di SD Negeri Pinding.

Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir SD NegeriPinding Kec Babel dari aspek peringatan bencana

Indikator peringatan bencana, indeksnya adalah sebesar 61%, walaupun termasuk kategori rendah akan tetapi sudah mendekati kategori sedang. Padahal seharusnya indikator peringatan dini bagi wilayah-wilayah yang rawan bencana seharusnya kategori tinggi, karena anak didik di sekolah adalah komunitas yang sangat rentan terhadap bencana. Sekolah harus melakukan upaya PRB termasuk memastikan, adanya akses terhadap peringatan dini akan adanya potensi kejadian bencana.

Dari informan yang didapat dari kelima informan bahwa informasi tentang peringatan bencana ada, dan perlu disosialisasikan. Akan tetapi petugas peringatan bencana sekolah tidak memiliki protap tertentu seperti tanda bunyi peringatan bencana, pembatalan bahaya tidak ada disiapkan peralatan khusus atau pemeliharaan peralatan untuk peringatan bencana.

Menurut informan, tahun ini kejadian bencana banjir tidak pernah datang diwaktu murid belajar dikelas. Bencana banjir datang pada malam hari, selain itu tidak ada arahan apapun dari kepala sekolah. Hal ini bisa jadi membuat sistem peringatan dini tidak dianggap penting.

Kondisi ini sebenarnya hampir sama dengan kondisi didaerah lain tentang minimnya sistem peringatan dini sekolah. Menurut hasil penelitian Rina Suryani (2016), tentang akses sekolah terhadap informasi peringatan dini tsunami di Provinsi Aceh, didapat hasil yang cukup memprihatinkan. Hanya 57,89 sekolah yang memiliki akses informasi terhadap peringatan bencana. Selain itu, hanya 52,63%

sekolah yang memiliki peralatan untuk menyampaikan atau menyebarluaskan peringatan tsunami seperti bel, sirine, lonceng, kentongan dan sebagainya, yang lebih memprihantakan lagi bahwa lebih dari 70% sekolah belum pernah melakukan sosialisasi maupun uji coba tanda/bunyi peringatan bencana. Hasil lain adalah sekolah yang memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi dalam hal peringatan bencana hanya 36,84%, yang memiliki tingkat kesiapsiagaan sedang sebesar 47,37%, dan kategori rendah 15,79%.

Harus diakui bahwa peringatan dini merupakan faktor utama dalam pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat yang berisiko mampu bertindak secara tepat dalam mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi risiko kematian, luka-luka, kerusakan dan kehilangan harta benda lainnya (Bachtar, dkk, 2021).

Anak-anak sekolah merupakan komunitas yang sangat rentan terhadap kejadian bencana. Oleh karena itu komunitas sekolah harus melakukan upaya pengurangan risiko bencana termasuk memastikan adanya akses terhadap peringatan dini. Sekolah harus menerima, memahami dan menindaklanjuti kebijakan atau program tentang kesiapsiagaan termasuk peringatan bencana (Oktari, dkk 2015).

Tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir SD NegeriPinding Kec Babel dari aspek mobilisasi sumber daya.

Indikator tentang mobilisasi sumber daya mempunyai skor 60%, dari 9 (Sembilan) pertanyaan yang dijawab “ya” adalah 5 pertanyaan. Di SD Negeri Pinding sebenarnya tersedia petugas/kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk kesiapsiagaan bencana seperti Pramuka, UKS, dan dokter kecil. Beberapa guru dan kepala sekolah sudah pernah mengikuti pelatihan atau disuksi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sekolah pernah mendapat bantuan dari pihak

swasta berupa peralatan walau dirasakan kurang memadai. Akan tetapi materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana belum dimasukkan kedalam materi pelajaran secara konsisten. Kelompok gugus tugas siaga bencana belum terbentuk dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kesiapsiagaan.

Hak untuk mendapatkan perlindungan menjadi kewajiban yang tidak dapat dielakkan mengingat kondisi wilayah lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara yang rawan bencana banjir. Anak-anak didik yang menghabiskan sebagian waktunya sekolah dimana lokasi sekolahnya rawan bencana perlu mendapat perhatian serius semua pihak terutama pemerintah terkait sebagaimana memberikan perlindungan sekaligus pemenuhan hak anak mendapatkan pendidikan dengan aman dan nyaman dalam proses belajar di sekolah.

Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran No. 70a/SE/MPN/2010 tentang Pengarus utamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/ Wali Kota di seluruh Indonesia dengan memperhatikan tiga poin penting yakni pertama “perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah, kedua “pelaksanaan strategi pengarus utamaan PRB di sekolah dilakukan baik secara structural dan non structural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan di sekolah, ketiga “surat edaran ini adalah pedoman untuk melaksanakan strategi pengarus utamaan PRB di sekolah. Akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh seknas SPAB (2017) bahwa penerapan program SPAB belum terkoordinasi dengan baik dan efektif, antara lain karena lemahnya dukungan dari lembaga pemerintah di tingkat daerah terhadap implementasi SPAB, masih terbatasnya pelatihan untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya untuk

memahami dan menerapkan program SPAB di sekolah masing- masing.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian seperti yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa indeks atau tingkat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir di Komunitas SD Negeri Pinding Kecamatan Babel masih tergolong kategori rendah. Padahal lokasi SD Negeri Pinding ini masuk dalam kawasan potensi bencana banjir, karena hampir setiap tahun dilanda banjir.

Indeks indikator kebijakan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan indikator yang paling rendah skornya yakni 35%, disusul indikator rencana tanggap darurat, indikator mobilisasi sumber daya dan indikator peringatan dini terjadinya bencana banjir. Walaupun pada penelitian ini terbatas pada penilaian sekolah sebagai institusi, akan tetapi dari wawancara mendalam dengan informan baik guru maupun penjaga sekolah maka indeks kesiapsiagaan yang diukur dari kuesioner institusi, dapat diwakili indeks kesiapsiagaan komunitas sekolah secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih bagi seluruh informan yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Pinding, Guru SD negeri Pinding, Tenaga Administrasi SD Negeri Pinding serta Penjaga sekolah SD negeri Pinding yang berpartisipasi membantu kegiatan penelitian. Terima kasih kepada Universitas Sari Mutiara yang telah mendukung seluruh proses penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bachtiar, Ernati; , Amin Ama Duwila; Muhammad Chaerul. (2021). *Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

- Bakornas, P. (2017). *Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- Bank World. (2014). *A Partical Guedeline to Making School Principals And School Pricinpals and School Commitees*.
- BNPB. (2015). *Pedoman Satuan Pendidikan Aman Bencana*. Jakarta.
- BPBA. (2019). *Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Aceh*. Dipetik Desember 06, 2019, dari <https://bpba.acehprov.go.id/index.php/page/17/tugas-dan-fungsi>.
- Kemendikbud. (2017). *Pendidikan Tangguh Bencana. Dalam Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencanadi Indonesia*. Jakarta.
- Kemendikbud. (2017). *Pendidikan Tangguh Bencana. Dalam Seknas SPAB*. Jakarta.
- Kemenkes. (2013). *Materi TOT PB dan Krisis Kesehatan PPKK*. Jakarta.
- Ketaren, O. (2015). *Kesehatan Lingkungan Dalam Penanggulangan*. Medan: USU Press.
- Khambali, I. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kurniawan, L. d. (2016). *Inisiasi Sekolah Madrasah Aman Bencana. Riset Kebencanaan Indonesia, Vol 2, No 2*.
- LIPI. (2017). *Pengembangan Framework untuk Mengukur Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Alam*. Jakarta: LIPI Press.
- LIPI. (2018). *Panduan Mengukur Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat dan Komunistas Sekolah*. Jakarta: LIPI Press.
- LIPI. (2018). *Panduan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Siaga Bencana*. Jakarta: LIPI Press.
- Nurjanah, & dkk. (2014). *Manajemen Bencana*. Aceh: Procedia Economics and Fiannce.
- Oktari, R. S. (2016). *Akses Sekolah Terhadap Informasi Peringatan Dini Tsunami*. Jakarta: Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. (2019). *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.
- Sakurai, & dkk. (2016). *The 11 Year Assesment On School Safety and Disaster Education at the Public Elementary Schools in Banda Aceh After The 2004 Tsunami Preliminary Findings*. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sarwidi, & dkk. (2015). *Evaluasi Sekolah Siaga Bencana (Vol. Vol 2)*. Yogyakarta: Riset Kebencanaan UGM.
- Syamsiah, & Noorman. (2017). *Sekolah Aman Dari Bencana, Kontribusi Pemangku Kepentingan Untuk Penurunan Tingkat Risiko Bencana*. Jakarta: UI Press.
- Widodo, T., & dkk. (2014). *Tingkat Kerentanan Bencana Banjir Sungai Citarum di Kecamatan Batujaya Kabupaten Kerawang*. Karawang: Jurnal Diaolog Penanggulangan Bencana.